

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Studi Kasus SD Inpres 12/79 Lompu, Kec. Cina, Kab. Bone

Harman Abdillah¹, Andi Patimbangi², Hartas Hasbi³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Corresponding Author: Harman Abdillah, e-mail: harman24902@gmail.com.

Published: August , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres 12/79 Lompu. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan teknik tematik. Fokus analisis diarahkan pada tiga indikator utama akuntabilitas, yaitu transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS telah melibatkan semua pihak terkait seperti kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Transparansi dilakukan melalui penyediaan papan informasi RKAS, meskipun belum diperbaharui secara berkala. Dari sisi efektivitas, penggunaan dana mengarah pada kebutuhan sekolah seperti alat tulis dan pelatihan guru. Namun, efisiensi masih terhambat oleh fluktuasi harga dan keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS di sekolah ini telah mencerminkan akuntabilitas, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek efisiensi dan keterbukaan informasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan bagi pihak sekolah dan pemangku kebijakan.

Kata Kunci: Dana BOS, Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas, Efisiensi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of accountability principles in the management of School Operational Assistance (BOS) funds at SD Inpres 12/79 Lompu. Employing a qualitative approach through a case study method, data were gathered via interviews, observation, and documentation, and analyzed thematically. The focus is on three key indicators of accountability: transparency, effectiveness, and efficiency. The findings reveal that BOS fund management involves key stakeholders such as the principal, treasurer, and school committee in planning, implementation, and reporting. Transparency is implemented through a public RKAS information board, although it is not updated regularly. In terms of effectiveness, the funds are used to support school needs like stationery and teacher training. However, efficiency faces challenges due to price fluctuations and limited resources. Thus, BOS fund management at this school reflects accountability in planning and execution, but needs improvement in efficiency and information disclosure. This study offers recommendations for school administrators and policymakers.

Keywords: BOS Fund, Accountability, Transparency, Effectiveness, Efficiency.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor vital dalam pembangunan bangsa yang bertujuan menciptakan generasi unggul dan berdaya saing. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa pemerintah wajib memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak [1]. Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung hal tersebut adalah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan dan menjamin kelangsungan operasional sekolah. Agar dana BOS dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran, pengelolaan keuangan sekolah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel [2]. Sayangnya, masih ditemukan berbagai kendala di lapangan, seperti ketidaktepatan perencanaan anggaran, kurangnya keterbukaan informasi kepada publik, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana [3]. Dalam konteks ini, akuntabilitas menjadi prinsip kunci yang harus diterapkan dalam seluruh tahapan pengelolaan dana BOS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Akuntabilitas yang baik akan menjamin penggunaan dana secara efektif,

efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada public [4][5]. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dana BOS di SD Inpres 12/79 Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Penelitian ini menjadi penting karena hasilnya dapat menjadi evaluasi sekaligus rekomendasi bagi pihak sekolah dan pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana secara berkelanjutan [6].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres 12/79 Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Metode yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual secara objektif berdasarkan hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi yang dilakukan di lokasi penelitian [7]. Dengan demikian, data yang diperoleh mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan mengenai transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana BOS [8]. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, dan wali murid yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji [9]. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi seperti laporan realisasi dana, bukti transaksi, dan papan informasi RKAS sebagai data sekunder. Seluruh data dianalisis secara tematik untuk menemukan pola-pola yang menggambarkan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah [10]. Lokasi penelitian berada di SD Inpres 12/79 Lompu dan pelaksanaannya dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Inpres 12/79 Lompu, Kecamatan Cina, Kab Bone.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres 12/79 Lompu dilaksanakan dengan mengikuti pedoman teknis dari pemerintah, mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam proses perencanaan, penyusunan RKAS dilakukan melalui rapat yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah guna menentukan prioritas kebutuhan sesuai kondisi sekolah. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi kolektif dan upaya menjunjung asas musyawarah demi tercapainya perencanaan yang transparan dan sesuai kebutuhan nyata.

Pada tahap pelaksanaan, penggunaan dana difokuskan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, seperti pengadaan perlengkapan alat tulis, biaya pemeliharaan fasilitas sekolah, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan. Sekolah juga menunjukkan upaya untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi yang berubah, walaupun masih terkendala oleh fluktuasi harga barang dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, pelaporan dana BOS dilakukan secara tertib melalui dokumentasi dan pengarsipan administrasi oleh bendahara sekolah serta disampaikan kepada instansi terkait sesuai prosedur. Sekolah juga menampilkan papan informasi RKAS sebagai bentuk transparansi, namun pembaruannya masih belum dilakukan secara berkala, sehingga informasi yang disajikan kurang aktual.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana BOS di SD Inpres 12/79 Lompu mencerminkan prinsip akuntabilitas yang baik, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan. Meski demikian, masih dibutuhkan peningkatan dari sisi efisiensi penggunaan anggaran dan optimalisasi pembaruan informasi kepada publik agar prinsip transparansi dapat diwujudkan secara utuh. Dengan adanya evaluasi dan pembenahan berkelanjutan, diharapkan pengelolaan dana BOS ke depannya dapat lebih efektif, efisien, serta mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), SD Inpres 12/79 Lompu

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres 12/79 Lompu menunjukkan pelaksanaan yang cukup baik, khususnya dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Prinsip akuntabilitas yang dimaksud mencakup tiga

indikator utama yaitu transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Pada aspek transparansi, sekolah telah menyediakan papan informasi RKAS sebagai media publikasi penggunaan dana BOS, meskipun belum diperbaharui secara berkala. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran untuk terbuka kepada masyarakat, namun keterbatasan dalam pembaruan informasi menjadi kendala dalam menciptakan transparansi yang berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan komite sekolah dalam proses perencanaan dan pelaporan juga menjadi indikator adanya upaya partisipatif dalam menciptakan tata kelola yang terbuka.

Dari sisi efektivitas, penggunaan dana BOS telah diarahkan untuk mendukung kebutuhan prioritas sekolah, seperti pengadaan alat tulis kantor, pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan. Penyesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan operasional sekolah menunjukkan bahwa pengelolaan telah disesuaikan dengan tujuan utama dana BOS, yakni menunjang kegiatan pembelajaran secara langsung. Meski demikian, efektivitas masih dapat ditingkatkan melalui evaluasi berkala atas hasil-hasil yang dicapai serta penyusunan program yang lebih terukur.

Adapun pada aspek efisiensi, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak sekolah, seperti perubahan harga barang yang menyebabkan pergeseran alokasi anggaran serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa penggunaan dana belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan hasil maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem kontrol internal yang lebih kuat, termasuk dalam perencanaan anggaran yang fleksibel dan realistis, serta peningkatan kapasitas manajemen keuangan di tingkat sekolah.

Secara keseluruhan, prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SD Inpres 12/79 Lompu telah diterapkan dengan cukup baik. Sekolah telah berupaya menjunjung asas keterbukaan, tanggung jawab, dan efisiensi dalam pelaksanaan program-programnya. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, khususnya dalam pembaruan informasi publik dan optimalisasi penggunaan dana, langkah-langkah awal yang dilakukan oleh pihak sekolah patut diapresiasi. Penerapan prinsip akuntabilitas ini menjadi dasar penting bagi peningkatan tata kelola pendidikan yang baik dan berkelanjutan, serta dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam mengelola dana BOS secara bertanggung jawab.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Fintech pada Masyarakat Kec. Awangpone.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres 12/79 Lompu dilakukan dengan mengacu pada prinsip manajemen berbasis sekolah dan mengikuti petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan. Proses pengelolaan mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan, yang masing-masing menunjukkan adanya partisipasi dari berbagai pihak internal sekolah seperti kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah. Dalam perencanaan, penyusunan RKAS dilakukan secara musyawarah untuk menentukan program prioritas berdasarkan kebutuhan riil sekolah, dengan mempertimbangkan daya dukung dan kondisi lokal. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran terhadap prinsip akuntabilitas sejak tahap awal pengelolaan dana.

Pada tahap pelaksanaan, dana BOS dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional utama seperti pengadaan perlengkapan alat tulis, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas fisik, serta kegiatan peningkatan kompetensi guru. Pengelolaan ini dilakukan dengan pendekatan efisiensi yang mempertimbangkan keterbatasan sumber daya sekolah. Meskipun sebagian besar pelaksanaan telah sesuai rencana, masih ditemukan kendala seperti keterlambatan realisasi belanja akibat fluktuasi harga barang dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan teknis keuangan. Sekolah telah berusaha mengatasi hal ini dengan melakukan koordinasi internal dan konsultasi dengan pihak dinas pendidikan, namun belum seluruh hambatan dapat diminimalkan secara maksimal.

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara tertib oleh bendahara sekolah melalui pengarsipan bukti transaksi, laporan realisasi penggunaan dana, dan pelaporan digital

melalui sistem ARKAS. Sekolah juga menyediakan papan informasi RKAS sebagai bentuk transparansi kepada publik, walaupun tidak selalu diperbarui secara berkala, sehingga mengurangi efektivitas transparansi tersebut. Kendala teknis dalam memperbarui informasi serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi publik menjadi faktor yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga belum optimal karena masih terbatas pada forum formal seperti rapat komite.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Inpres 12/79 Lompu telah dilakukan secara sistematis dan bertahap, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi yang berlaku. Sekolah telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, khususnya transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Namun, penguatan pada aspek pengawasan masyarakat, pembaruan informasi, serta pelatihan teknis bagi pengelola dana perlu terus ditingkatkan. Hal ini penting agar pengelolaan dana BOS tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga berdaya guna secara strategis dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

2. Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), SD Inpres 12/79 Lompu.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SD Inpres 12/79 Lompu menunjukkan bahwa pihak sekolah telah berupaya melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dana publik secara transparan, efektif, dan efisien. Prinsip akuntabilitas yang dijalankan mengacu pada tiga indikator utama, yaitu transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Pada aspek transparansi, sekolah telah menyediakan papan informasi RKAS sebagai media publikasi kepada masyarakat, meskipun belum diperbarui secara berkala. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi sudah dimulai, namun belum berjalan maksimal karena keterbatasan dalam manajemen informasi dan teknologi. Keterlibatan komite sekolah, guru, dan sebagian wali murid dalam perencanaan dan evaluasi juga menunjukkan adanya partisipasi yang mendukung transparansi, meskipun perlu ditingkatkan dari sisi frekuensi dan kualitas keterlibatan.

Dari aspek efektivitas, dana BOS telah digunakan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan seperti pengadaan alat tulis, biaya pelatihan guru, perbaikan sarana, dan kebutuhan operasional lainnya. Pemanfaatan dana disesuaikan dengan prioritas kebutuhan yang dirumuskan dalam RKAS, yang berarti pelaksanaan telah diarahkan pada tujuan yang relevan dan memberikan dampak nyata terhadap operasional sekolah. Namun, efektivitas masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga barang dan kondisi geografis yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program, sehingga dibutuhkan evaluasi berkala untuk mengukur pencapaian hasil dari setiap pengeluaran dana.

Adapun dalam aspek efisiensi, meskipun dana digunakan untuk kebutuhan mendesak dan penting, masih ditemukan kendala dalam pengalokasian anggaran yang tidak selalu sesuai dengan realisasi kebutuhan di lapangan. Perubahan harga dan keterbatasan daya beli di daerah pedesaan sering menyebabkan ketidakseimbangan antara rencana anggaran dan realisasi belanja. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan masih menjadi tantangan, sehingga efisiensi belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi bagi bendahara dan tim pengelola dana BOS, baik dalam hal perencanaan, pengendalian, maupun pelaporan keuangan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SD Inpres 12/79 Lompu telah menunjukkan kemajuan positif, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan. Sekolah telah menjalankan sebagian besar kewajibannya secara bertanggung jawab, melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, dan berusaha menjaga keterbukaan serta ketertiban administrasi. Meski demikian, untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang optimal, perlu adanya pembenahan dalam aspek efisiensi penggunaan anggaran, pembaruan informasi secara berkala, serta penguatan peran pengawasan dari masyarakat dan pihak eksternal. Dengan perbaikan ini, pengelolaan dana BOS tidak hanya akan akuntabel secara administratif, tetapi juga berdampak strategis terhadap peningkatan kualitas pendidikan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres 12/79 Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pengelolaan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, serta guru. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan anggaran.

Penerapan prinsip akuntabilitas tercermin dari tiga aspek utama. Transparansi telah diwujudkan melalui penyediaan papan informasi RKAS meskipun belum diperbarui secara berkala. Efektivitas terlihat dari penggunaan dana untuk kebutuhan operasional yang relevan seperti alat tulis dan pelatihan guru. Sementara itu, pada aspek efisiensi, masih terdapat kendala seperti perubahan harga dan keterbatasan sumber daya yang menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak selalu optimal. Secara umum, sekolah telah berusaha menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik, namun tetap perlu peningkatan dalam hal pembaruan informasi, efisiensi penggunaan anggaran, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggraini, Ristya Dwi, 'Transparansi , Partisipasi , Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS Di SDN Pacarkeling VIII Surabaya', *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1.2 (2013).
- [2] Andriani, R. (2019). Efisiensi Anggaran Dana BOS dan Kedisiplinan Pelaksanaan RKAS. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 7(1), 75–83.
- [3] Br. Sitanggang, Indri Cendana, and Dewi Wahyuni, 'Pengaruh Efisiensi Biaya Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Upt Sd Negeri 065006 Belawan', *Worksheet : Jurnal Akuntansi*, 2.1 (2022).
- [4] Dewi, Mertayani Sari, and Desak Putu Ayu Purma Dewi, 'Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Bos Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Sdn 2 Galungan', *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 7.3 (2022).
- [5] Fitriani, Lainah, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Panteraya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah', in *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2022.
- [6] Handayani, N. (2021). Efisiensi Penggunaan Dana BOS: Studi Kasus di Beberapa SD Negeri di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*
- [7] Hidayat, M. A. (2021). Penerapan Teori Henri Fayol dalam Manajemen BOS di Sekolah Negeri. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 6(3).
- [8] Intan, Tia Putri, and Zulkarnain Zulkarnain, 'Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi', *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1.2 (2023).
- [9] Nurhayati, Arifuddin, Mulyanti Akib, La Ode Suriadi, M Natsir, and Aini Indrijawati, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Kolaka Timur', *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 8.22 (2023).
- [10] Yuliana, T. (2019). Kendala Teknis dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*.